SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENURUNKAN KASUS STUNTING DI DESA BATU BEGIGI KECAMATAN TANAH PINOH KABUPATEN MELAWI

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

OLEH

HOTMA P. S KALIT
NIM. E1012211062

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENURUNKAN KASUS STUNTING DI DESA BATU BEGIGI KECAMATAN TANAH PINOH KABUPATEN MELAWI

Disusun Oleh:

HOTMA P.S KALIT
NIM. E1012211062

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Dr. Yulius Yohanes, M.Si
NIP. 196405271992021001

Tanggal : ……

Pembimbing Kedua

Drs. Asmadi, M.Si
NIP. 196803091992031003

Tanggal : ……

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENURUNKAN KASUS STUNTING DI DESA BATU BEGIGI KECAMATAN TANAH PINOH KABUPATEN MELAWI

Oleh :

HOTMA P.S KALIT
NIM. E1012211062

Dipertahankan di	:	Pontianak
Pada Hari/Tanggal	:	Senin, 07 Juli 2025
Waktu	:	15.00 – 17.00 WIB
Tempat	:	Ruang Sidang 1

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Yulius Yohanes, M.Si	Drs. Asmadi, M.Si
NIP. 196405271992021001	NIP. 196803091992031003

Penguji Utama	Penguji Pendamping
Prof. Dr. H. Martoyo, MA	Herri Junius Nge, S.Sos., M.Si
NIP. 196010031986031004	NIP. 198506092015041002

Disahkan Oleh
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis proses implementasi kebijakan dalam menurunkan kasus stunting di Desa Batu Begigi Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, dilihat dari aspek pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kulaitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan proses pengorganisasian implementasi Kebijakan Dalam Menurunkan Kasus Stunting di desa Batu Begigi sudah terlaksana, namun belum maksimal. terutama dalam pembentukan Pengurus di Desa Batu Begigi. (2) Pelaksanaan proses interpertasi implementasi Kebijakan Dalam Menurunkan Kasus Stunting di Desa Batu Begigi, sudah terlaksana, namun belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan proses sosialisasi melalui Transmisi atau penyaluran informasi kurang jelasnya diterima para pelaksana. (3) Pelaksanaan proses aplikasi implementasi Kebijakan Dalam Menurunkan Kasus Stunting di Desa Batu Begigi, yang tertuang dalam panduan pembentukan operasionalisasi Kebijakan Dalam Menurunkan Kasus Stunting, sudah terlaksana tetapi belum maksimal.

Keyword: Implementasi Kebijakan, Stunting.

ABSTRACT

This study attempts to characterize and examine, from the perspectives of organization, interpretation, and application, the policy implementation process in lowering the number of instances of stunting in Batu Begigi Village, Tanah Pinoh District, Melawi Regency. The research used descriptive qualitative methodology. The findings show that 1) The organizing process for adopting policies to reduce stunting cases in Batu Begigi village has been carried out, but not to the fullest extent, particularly in Batu Begigi Village's establishment of the Management Board. (2) Although it has been carried out, the interpretation process of the policies implemented to reduce the number of cases of stunting in Batu Begigi Village has not been optimized. This is evident when the socialization process was carried out by disseminating or transmitting knowledge that the implementers did not fully understand. (3) Although the policy implementation application procedure, which is part of the recommendations for the formulation of operationalization of policies in reducing stunting instances, has been implemented, it has not been optimized in Batu Begigi Village.

Keywords: **Implementation Policy, Stunting**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : HOTMA P. S KALIT

Nomor Mahasiswa : E1012211062

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Juli 2025

Yang membuat Pernyataan



HOTMA P. S KALIT

NIM. E1012211062

RINGKASAN SKRIPSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahim 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 tentang percepatan penumnan dan pencegahan stunting terintegrasi Kabupaten Melawi bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan sfunting. Selain itu, percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan.

Percepatan Penurunan Sfunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarra multisektor di pusat, daerah, dan desa. Upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting, khususnya dalam proses implementasi kebijakannya seperti; keterbatasan tenaga kesehatan masyarakat, motivasi dari kader dalam, pencegahan stunting, kondisi masyarakat yang kurang pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pencegahan stunting, kurangnya dukungan dari masyarakat karena adanya anggapan stunting terjadi karena keturunan. Kebijakan terkait penurunan stunting, merupakan konteks kebijakan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menjawab penelitian: bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan penurunan stunting di Desa Batu Begigi Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dengan menggunakan analisis lingkungan kebijakan (*context of poliy*). Penanganan dari masalah stunting perlu dilakukan sesuai dengan aturan dan masalah yang menjadi esensi yang diatur oleh pemerintah.

Adapun Teori yang di gunakan dalam proses implementasi kebijakan adalah teori Jones. Menurut Jones (2006:46) bahwa proses implementasi suatu kebijakan

ditentukan tiga kegiatan sebagai pilarnya, yaitu: a). Tahap Pengorganisasian, yaitu menyangkut penataan kembali sumber daya, pembentukan unit-unit dan metode untuk menjadikan program, birokrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. b).Tahap Interpretasi, yaitu menafsirkan dalam bentuk rencana dan pengarahan, pemahaman pada setiap tahapan dalam penerapan kebijakan. c). Tahap Aplikasi/penerapan, yaitu ketentuan rutin dan pelayanan, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kulaitatif dengan Teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan Studi Dokumentasi. Untuk teknik keabsahan data dikumpulkan diolah dan diuji keabsahannnya melalui triangulasi yang meliputi Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik dan Triangulasi Waktu. Pada penelitian ini untuk menguji validasi data yang diperoleh di lapangan, peneliti menggunakan triangulasi teknik, karena dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dalam mendapatkan data dari sumber yang sama yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi berkenaan dengan proses implementasi kebijakan dalam menurunkan kasus stunting di Desa Batu Begigi Kecamatan Tanah Pmoh Kabupaten Melawi.

Hasil penelitian menunjukan; 1). Pelaksanaan proses pengorganisasian implementasi Kebijakan Dalam Menurunkan Kasus Stunting di desa Batu Begigi sudah terlaksana, namun belum maksimal. terutama dalam pembentukan Pengurus di Desa Batu Begigi belum dilakukan sesuai dengan kegiatan pemilihan pengurus dan kader melalui pertemuan khusus para pemimpin formal Desa dan tokoh masyarakat serta beberapa wakil masyarakat. Pemilihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, sesuai dengan tata cara dan kriteria yang berlaku, dengan difasilitasi oleh Puskesmas Tanah Pinoh. 2). Pelaksanaan proses interpertasi implementasi Kebijakan Dalam Menurunkan Kasus Stunting di Desa Batu Begigi, sudah terlaksana, namun belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan proses sosialisasi melalui Transmisi atau penyaluran informasi kurang jelasnya diterima para pelaksana seperti Kades dan pihak puskesmas, sehingga tidak semua masyarakat mengetahui atau

memahami program tersebut. 3) Pelaksanaan proses aplikasi implementasi Kebijakan Dalam Menurunkan Kasus Stunting di Desa Batu Begigi, yang tertuang dalam panduan pembentukan operasionalisasi Kebijakan Dalam Menurunkan Kasus Stunting, sudah terlaksana tetapi belum maksimal, seperti: ketercukupan tenaga pelaksana, kewenangan sebagai otoritas atau legimitasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan masih terbatas maka kekuatan para implementor dalam melaksanakan program tersebut dimata masayarakat kurang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi Kabupaten Melawi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Dalam Menurunkan Kasus Stunting Di Desa Batu Begigi Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi" Penulis menyadari, bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam penyusunan kalimat atau kata-kata maupun dalam metodelogi. Sehubungan dengan itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya konstruktif agar kekurangan dan kelemahan dapat diatasi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bimbingan dari dosen pembimbing yaitu: Dr. Yulius Yohanes, M.Si, selaku Dosen pembimbing utama dan Drs. Asmadi, M.Si, selaku Dosen pembimbing kedua yang telah banyak memberikan masukan sehingga terselesainya Skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

Pontianak, Juni 2025
Penulis

HOTMA P.S KALIT
NIM. E1012211062

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
ABSTRAK iii
ABSTRACT iv
RINGKASAN SKRIPSI v
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang Penelitian 1
- 1.2. Identifikasi Masalah 5
- 1.3. Fokus Penelitian 6
- 1.4. Perumusan Masalah 6
- 1.5. Tujuan Penelitian 6
- 1.6. Manfaat Penelitian 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA
- 2.1 Konsep Kebijakan Publik 8
- 2.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik 10
- 2.3 Hasil Penelitian yang Relevan/Terdahulu 24
- 2.4 Alur Pikir Penelitian 28
- 2.5 Pertanyaan Penelitian 30

BAB III METODE PENELITIAN
- 3.1 Jenis Penelitian 31
- 3.2 Langkah-Langkah Penelitian 31
- 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 32
- 3.4 Subjek dan Objek Penelitian 33
- 3.5 Teknik Pengumpulan Data 34
- 3.6 Alat Pengumpulan Data 35
- 3.7 Teknik Analisis Data 35
- 3.8 Teknik Keabsahan Data 37

BAB IV GAMBARAN UMUM DESA BATU BEGIGI KECAMATAN TANAH PINOH KABUPATEN MELAWI
- 4.1 Keadaan Geografis 40
- 4.2 Keadaan Demografis 42
- 4.3 Pemerintah Desa Batu Begigi 49

4.4 Pembagian Tugas Dan Wewenang..... 51
4.5 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perwakilan Desa..... 54

BAB V IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENURUNKAN KASUS STUNTING DI DESA BATU BEGIGI KECAMATAN TANAH PINOH KABUPATEN MELAWI
5.1 Pengorganisasian Kebijakan Dalam Menurunkan Kasus Stunting 57
5.2 Interpretasi Kebijakan Menurunkan Kasus Stunting 66
5.3 Aplikasi Kebijakan Menurunkan Kasus Stunting 73

BAB VI PENUTUP
6.1 Kesimpulan..... 80
6.2 Saran-Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang menjadi perhatian pemerintah dan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan. Penerapan kebijakan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Melawi dilakukan melalui strategi intervensi terintegrasi yang meliputi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang beranggapan bahwa tingginya stunting di kabupaten ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti anggaran untuk pelaksanaan program yang terbatas, masih rendahnya koordinasi antara OPD dan masih kurangnya perhatian dan pola asuh orang tua terhadap Balita stunting, faktor lingkungan fisik, lingkungan sosial dan ekonomi serta budaya. Adanya berbagai hambatan dalam proses implementasi kebijakan ini, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memang merupakan sebuah proses yang kompleks. Gagalnya pencapaian tujuan kebijakan dalam proses implementasi juga disebabkan tidak adanya jaminan kebijakan yang dipilih dikomunikasikan dengan baik oleh target, sehingga memberikan hasil yang diinginkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahim 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi Kabupaten Melawi bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia

yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan sfunting. Selain itu, percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;

Percepatan Penurunan Sfunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarra multisektor di pusat, daerah, dan desa. Upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting, khususnya dalam proses implementasi kebijakannya seperti; keterbatasan tenaga kesehatan masyarakat, motivasi dari kader dalam, pencegahan stunting, kondisi masyarakat yang kurang pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pencegahan stunting, kurangnya dukungan dari masyarakat karena adanya anggapan stunting terjadi karena keturunan. Kebijakan terkait penurunan stunting, merupakan konteks kebijakan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menjawab penelitian: bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan penurunan stunting di Desa Batu Begigi Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dengan menggunakan analisis lingkungan kebijakan (*context of poliy*). Penanganan dari masalah stunting perlu dilakukan sesuai dengan aturan dan masalah yang menjadi esensi yang diatur oleh pemerintah.

Permasalahan Stunting akhir-akhir ini menjadi salah satu pemberitaan yang dibahas bukan hanya didunia kesehatan, karena permasalahan stunting ini dianggap sebagai ancaman yang memiliki dampak terhadap sumbei daya manusia. Permasalahan anak pendek atau lebih dikenal dengan stunting adalah permasalahan gizi yang saat ini dihadapi di Kabupaten Melawi, khususnya di Desa Batu Begigi Kecamatan Tanah Pinoh. Dampak yang ditimbulkan jangka pendek dari Stunting pada masa kanak-kanak perkembangannya menjadi lebih terhambat, terjadinya penurunan fungsi kognitif, serta penurunan fungsi kekebalan tubuh, dan gangguan sistem pembakaran. Sedangkan dampak jangka panjang yang disebabkan oleh Stunting terjadi pada masa dewasa yakni timbulnya risiko penyakit degeneratif, seperti diabetes melitus, jantung koroner, hipertensi, dan juga obesitas.

Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting (gizi buruk) di Desa Batu Begigi Kecamatan Tanah Pinoh, sering menghadapi berbagai kendala, seperti:

a. Masalah pengorganisasian dalam implementasi kebijakan penurunan kasus stunting bisa sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, seperti penurunan stunting melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas kesehatan, pendidikan, dan lembaga non-pemerintah. Koordinasi yang buruk antar lembaga ini dapat menyebabkan tumpang tindih, kekurangan sumber daya, atau bahkan konflik dalam pelaksanaan kebijakan. Pengorganisasian sumber daya, baik finansial

maupun manusia, sangat penting. Keterbatasan anggaran, distribusi sumber daya yang tidak merata, dan kurangnya tenaga kesehatan atau penyuluh gizi di daerah-daerah tertentu dapat mempengaruhi efektivitas program. Selain itu, tanpa rencana yang jelas dan strategi yang terstruktur, implementasi kebijakan dalam menurunkan kasus stunting dapat menjadi tidak efektif. Rencana harus mencakup tujuan yang spesifik, strategi pelaksanaan, jadwal, dan mekanisme evaluasi. Rencana yang kurang matang dapat menyebabkan kebingungan dan kurangnya arah.

b. Masalah interpretasi dalam implementasi kebijakan penurunan kasus stunting dapat menimbulkan berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi mungkin memiliki pemahaman yang berbeda mengenai tujuan dan sasaran kebijakan. Misalnya, pengambil keputusan, petugas kesehatan, dan masyarakat mungkin memiliki interpretasi yang berbeda tentang apa yang perlu dicapai, yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan. Kurangnya pelatihan atau pendidikan yang memadai bagi para pelaksana kebijakan dapat mengakibatkan interpretasi yang salah atau tidak konsisten mengenai prosedur, pedoman, atau tujuan kebijakan. Kemudian perubahan dalam kebijakan atau regulasi selama proses implementasi dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam penafsiran. Penyesuaian yang cepat atau perubahan yang sering bisa membuat pelaksana kebijakan sulit mengikuti dan menerapkan kebijakan dengan benar.

c. Masalah dalam aplikasi atau penerapan implementasi kebijakan dalam menurunkan kasus stunting bisa sangat beragam dan kompleks. Pengalokasian sumber daya yang tidak memadai baik dalam bentuk anggaran, tenaga kerja, maupun fasilitas dapat membatasi efektivitas implementasi kebijakan. Misalnya, di Desa Batu Begigi Kecamatan Tanah Pinoh yang kekurangan fasilitas kesehatan dan gizi yang memadai akan kesulitan menerapkan program secara efektif. Infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan kebijakan (seperti pusat kesehatan, sekolah, atau fasilitas distribusi makanan) belum memadai, sehingga menyulitkan akses dan pelaksanaan program secara menyeluruh. Selain itu, penerapan kebijakan tentunya memerlukan kepatuhan yang tinggi dari semua pihak terkait. Dalam praktiknya, terdapat risiko bahwa petugas kesehatan atau penyuluh gizi tidak selalu konsisten dalam menerapkan pedoman atau melakukan pemantauan, yang dapat mengurangi dampak kebijakan tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

a. Pengorganisasian yang meliputi koordinasi yang tidak efektif, keterbatasan sumber daya dan perencanaan yang kurang matang
b. Interpretasi yang meliputi pemahaman tujuan dan sasaran yang berbeda, kebijakan yang tidak jelas atau ambigu dapat menyebabkan berbagai pemahanan kebijakan yang tidak sesuai atau kurang efektif.

c. Aplikasi atau penerapan yang meliputi kekurangan dalam infrastruktur dan masalah logistik menghambat distribusi sumber daya yang diperlukan, kurangnya konsistensi dalam penerapan pedoman sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan penolakan terhadap perubahan kebiasaan.

1.3 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka dibatasi ruang lingkup penelitian ini pada: Proses Implementasi Kebijakan Dalam Menurunkan Kasus Stunting Di Desa Batu Begigi Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi.

1.4 Rumusan Penelitian

Mengacu kepada permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, sebagai suatu kerangka dasar pemikiran dalam penelitian ini yang konsisten dengan kajian mengenai permasalahan yang dihadapi, maka selanjutnya dirumuskan masalah tersebut sebagai berikut: Bagaimana Proses Implementasi Kebijakan Dalam Menurunkan Kasus Stunting Di Desa Batu Begigi Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang beserta permasalahan sebagaimana dalam uraian tersebut yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

menggambarkan dan menganalisis proses implementasi kebijakan dalam menurunkan kasus stunting di Desa Batu Begigi Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, dilihat dari aspek pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan program studi Ilmu Administrasi Publik, yang berkaitan dengan spesialisasi Kebijakan Publik.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung, khususnya

a. Bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, dan lembaga kesehatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk merumuskan atau menyesuaikan kebijakan yang lebih efektif dalam penurunan stunting.
b. Bagi masyarakat desa penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, sehingga mengurangi prevalensi stunting di kalangan anak-anak. Dengan adanya kebijakan yang diterapkan secara efektif, kesehatan dan pertumbuhan anak-anak di Desa Batu Begigi diharapkan akan membaik.